

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, tanggung jawab orang tua, masyarakat dan pemerintah. Upaya peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Sejalan dengan arah kebijaksanaan bidang pendidikan yang tercantum dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas maka manusia Indonesia seutuhnya yang diharapkan adalah manusia yang berakhlak mulia yang memiliki kecerdasan, bermoral, berbudi pekerti, yang berkarakter untuk memperkuat jati diri sebagai bangsa.

Persekolahan merupakan wahana yang strategis untuk merealisasikan tujuan pendidikan Nasional tersebut, dalam arti untuk membentuk kepribadian, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap pada peserta didik.

Dalam hubungan ini mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sangat penting terlebih dalam perspektif transformasi menuju masyarakat madani (*civil society*)

yang dipandang tepat sebagai arah dan orientasi perubahan masyarakat Indonesia baru. terlebih pada era desentralisasi dan otonomi daerah yang demokratis. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya semua pihak sepakat bahwa pendidikan merupakan pranata sosial yang dapat dijadikan wahana investasi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam memperkuat jati diri bangsa. Penulis jadi teringat pada peribahasa “Orang pintar tanpa budi pekerti luhur akan bahaya, sebaliknya orang yang berbudi luhur tetapi tidak pintar juga kurang berguna”. Itulah manusia yang akan menyelamatkan dirinya, keluarga, bangsa dan negaranya. Begitulah manusia ideal menurut Ki Hajar Dewantara. Namun untuk mencapai manusia yang demikian, tidak bisa ia dibiarkan tumbuh sesukanya, ia perlu tuntunan, itulah yang disebut Ki Hajar Dewantara sebagai pendidikan. Dalam bahasa Ki Hajar, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir batin. Apa yang diuraikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu, tampaknya relevan hingga kini di tengah-tengah dekadensi moral yang melanda bangsa ini. Oleh karena itu pendidikan harus memerankan diri secara proaktif mencari alternatif pemecahan yang strategis dan futuristik untuk memperkokoh kehidupan berkonstitusi yang demokratis sebagai basis tumbuhnya masyarakat madani. Tidak lain yang paling tepat adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari proses kebudayaan dalam arti bahwa melalui pendidikan terjadi pendewasaan pada diri manusia, melalui pendidikanlah ia

belajar tentang pengetahuan, pendidikan nilai, mendapat pendidikan keterampilan dan juga mendapat pendidikan berbagai tuntutan-tuntutan untuk menghadapi perubahan jaman. Jadi pendidikanlah yang mengajarkan kepada manusia agar mereka bisa menyesuaikan diri.

Sumber daya manusia Indonesia yang bermutu merupakan aset bangsa dan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional di berbagai sektor dan dalam menghadapi tantangan kehidupan masyarakat dalam era globalisasi. Kualitas sumber daya manusia ini tidak lain ditentukan oleh hasil produktivitas lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, baik yang melalui jalur sekolah dan luar sekolah, serta secara khusus merupakan hasil proses belajar mengajar di kelas. Sistem pendidikan nasional bukan hanya bertujuan menghasilkan manusia yang cerdas (secara akademis), tetapi juga yang bermoral tinggi dan mampu menghadapi tantangan kehidupan yang penuh persaingan dalam era globalisasi ini. Tantangan global membuka peluang baru bagi masyarakat dan bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan mampu mengatasi persaingan dunia yang semakin tinggi.

Tantangan-tantangan tersebut antara lain disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, tuntutan akan kehidupan demokrasi yang semakin gencar, tuntutan akan pengakuan hak asasi manusia, dan tata kehidupan ekonomi baru. Di dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut diperlukan bentuk pendidikan baru untuk dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap lahirnya budaya global. Hanya dengan persiapan yang baiklah bangsa

Indonesia memasuki milenium ketiga yaitu memiliki sikap inovatif, kompetitif, tegar, fleksibel dan mampu bekerjasama. Dengan sikap-sikap tersebut keikutsertaan di dalam kehidupan global yang semakin cepat dan semakin menyatu dapat segera dicapai. Namun salah satu kelemahan pendidikan di Indonesia adalah belum mampu menanamkan nilai-nilai yang mendukung pembentukan sikap-sikap yang diperlukan. Hanya bangsa yang inovatif yang dapat mengambil makna dari kehidupan global. Sebaliknya apabila bangsa yang pendidikannya hanya terus-menerus mementingkan kognitif, mengisi ujian dengan mengandalkan pilihan ganda, menghafal rumus-rumus yang sulit, tetapi tidak inovatif maka akan kalah bersaing di era global ini.

Menurut laporan Bank Dunia dalam Skala Internasional No.16369-IND, studi IAEA (*Internasional Association for the Evalution of Educational Achievement*) di Asia Timur menunjukkan kedudukan bahwa keterampilan membaca siswa kelas V SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia). (Balitbang Depdiknas,2001 dalam Nuryati E). Dalam hal ini yang diperlukan adalah sikap inovatif dan kreatif di dalam mengadakan penemuan-penemuan baru bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi permasalahan yang cukup rumit untuk dipecahkan, terutama sekali berkaitan dengan kualitas pendidikan baik dalam dimensi proses, maupun hasil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para pihak yang peduli terhadap

masalah pendidikan menyimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat rendah. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini terbukti dari laporan United Nation Development Program (UNDP) yang menempatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia berada di peringkat 105 dari 147 negara. Kedudukan Indonesia jauh di bawah Singapura, Malaysia, dan Filipina, atau berada sedikit di atas negara-negara Afrika (Dirjen Dikdasmen 2000, dalam Nuryanti E). Hal lain yang menjadi bukti rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kemampuan membaca kritis dan tingkat kreativitas siswa SD dan Sekolah Lanjutan jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Oleh karena itu pendidikan harus memerankan secara proaktif mencari pemecahan yang strategis dan futuristik untuk memperkuat kehidupan berkonstitusi yang demokratis sebagai basis tumbuhnya masyarakat madani. Berangkat dari pendapat bahwa krisis yang terjadi dinilai sebagai krisis demokrasi, krisis moral, maka krisis ini memberikan suatu isyarat bahwa perlu adanya upaya revitalisasi nilai-nilai demokrasi, pendidikan demokrasi, dan demokrasi pendidikan. Tidak lain yang paling tepat adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran ini memiliki potensi dan posisi yang strategis untuk dikembangkan dalam tradisi *citizenship education*, antara lain mengembangkan nilai demokrasi dan kesadaran berdemokrasi untuk menegakkan negara hukum dan membangun warga negara yang cerdas, berkarakter dalam memperkuat jati diri bangsa.

Kecerdasan yang dimaksudkan dalam mata pelajaran PPKn adalah kecerdasan yang meliputi dan merupakan kesatuan yang utuh dari ketiga ranah kognitif,afektif, dan psikomotorik. Karena PPKn merupakan salah satu Pendidikan Nilai di Indonesia, jadi pembinaan nilai, moral,dan normanya harus secara (*holistik approach*) menurut Elizabeth Leonie & Simpson dalam Djahiri Kosasih.A.(1996) yang mendalilkan keharusan pembinaan diri manusia secara holistik (utuh menyeluruh). Ini bermakna bahwa pendidikan nilai hanya akan berjalan baik dan manusiawi kalaulah ketiga potensi diri manusia dilibatkan dan dibina. Oleh sebab itu pembelajaran tidak selalu harus dari kognitif atau afektif atau psikomotorik, kualifikasi substansi yang harus diserap, kemampuan siswa dan kondisi serta kebutuhan menentukan awalan pembelajaran tersebut, tetapi ketiga potensi itu harus berproses dan terlibat secara kait mengkait.

Berdasarkan keputusan Mendiknas No.017/U/2003 Tanggal 7 Pebruari 2003 tentang penghapusan Ebtanas untuk beberapa mata pelajaran termasuk PPKn dari SD, SLTP dan SLTA. Dengan adanya keputusan tersebut merupakan angin segar bagi guru-guru PPKn khususnya dan guru-guru lain umumnya, karena dengan keputusan tersebut guru-guru tidak lagi mengajar hanya mengejar target nilai ebtanas saja, tetapi dapat dengan leluasa untuk menerapkan berbagai model proses pembelajaran dan penilaian yang mengarah pada tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. Sehingga melalui PPKn dapat dikembangkan berbagai kemampuan dasar warga negara seperti berpikir kritis, dapat membuat keputusan, memegang teguh aturan yang adil, menghormati hak

orang lain, menjalankan kewajiban, bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya, beriman dan bertakwa sesuai dengan agamanya, memiliki komitmen yang tinggi terhadap keputusan bersama, mengemukakan pikiran secara lisan dan tulisan, berargumentasi, memimpin orang lain, berorganisasi dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (Kurikulum 1994, Suplemen GBPP PPKn).

Sejak diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan (persekolahan maupun perguruan tinggi), PPKn menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah : (1) masukan instrumental terutama yang berkaitan dengan kualitas guru serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, (2) masukan lingkungan terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan PPKn tidak mengarah pada misi sebagaimana semestinya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan ke arah yang tidak benar (kurikulum 1994, Suplemen GBPP PPKn) antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama proses pembelajaran dan penilaian dalam PPKn lebih menekankan pada dampak instruksional yang terbatas pada penguasaan materi atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan perolehan dampak pengiring sebagai "*hidden curriculum*" belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.



Kedua pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui keterlibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas (intra dan ekstra kurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa.

Ketiga pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler sebagai wahana sosiopedagogis untuk mendapatkan "*hands on experience*" juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

Indikasi tersebut melukiskan begitu banyaknya kendala kurikuler dan sosio kultural bagi PPKn untuk menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang mencerminkan pencapaian secara komprehensif dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar PPKn yang belum mencapai keseluruhan dimensi secara optimal seperti yang ditargetkan itu berarti menunjukkan bahwa tujuan kurikuler PPKn belum dapat dicapai sepenuhnya. Selain menghadapi kendala internal sebagaimana diuraikan di atas, PPKn juga menghadapi kendala eksternal yaitu kritikan dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat berkaitan dengan semangat demokrasi yang semakin tinggi dengan segala akibatnya.

PPKn yang secara paradigmatis sarat dengan muatan afektif namun dilaksanakan secara kognitif telah disikapi secara keliru. Untuk mengatasi permasalahan kehidupan para siswa khususnya yang menyangkut perilaku dan

moral. Namun demikian, kritikan dan tuntutan tersebut sudah seharusnya disikapi dengan respons yang positif dan diakomodir secara proporsional karena memang pendidikan secara umum dan PPKn khususnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara.

Di lain pihak terdapat pula beberapa permasalahan kurikuler yang mendasar dan menjadi penghambat dalam peningkatan kualitas PPKn demikian pula yang disikapi oleh guru-guru PPKn di SMA N 9 Bandung adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan alokasi waktu yang tercantum dalam Struktur Kurikulum Pendidikan dijabarkan secara kaku dan konvensional sebagai jam pelajaran tatap muka terjadwal sehingga kegiatan pembelajaran PPKn dengan cara tatap muka di kelas menjadi sangat dominan. Hal itu mengakibatkan guru tidak dapat berimprovisasi secara kreatif untuk melakukan aktivitas lainnya dari pembelajaran rutin tatap muka yang terjadwal dengan ketat.
2. Pelaksanaan pembelajaran PPKn yang lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan dimensi kognitif mengakibatkan porsi peningkatan dimensi lainnya menjadi terbengkalai. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian diperparah lagi dengan keterbatasan fasilitas media pembelajaran.
3. Pembelajaran yang terlalu menekankan pada dimensi kognitif itu berimplikasi pada penilaian yang juga menekankan pada penguasaan kecerdasan kemampuan kognitif saja, sehingga mengakibatkan guru harus selalu mengejar target pencapaian materi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu



melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap masalah-masalah mendasar sehingga PPKn dapat diberdayakan menjadi subjek pembelajaran yang kuat yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri bermakna, terintegrasi, berbasis nilai, menantang, dan mengaktifkan. Melalui pengalaman belajar semacam itulah guru berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk dapat membangun kecerdasannya yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor psikopedagogik konstruktif. Yaitu: (1) *civics knowledge*, (2) *civics skills*, (3) *civics disposition*.

Sedangkan proses pembelajaran PPKn yang berlangsung di SMAN 9 Bandung sangat bervariasi sesuai dengan gaya mengajar gurunya masing-masing, tetapi secara umum terdapat berbagai kendala, baik dilihat dari segi guru maupun siswa. Berbagai kendala yang muncul dilihat dari segi mengajar guru antara lain: proses pembelajaran masih sangat monoton, guru kurang mampu mengembangkan materi yang diajarkan, guru terikat pada kurikulum atau buku paket dan LKS, materi pembelajaran yang padat, waktu yang disediakan sangat terbatas, media pembelajaran sangat kurang bahkan tidak mendukung, dan kurang kreatifnya guru dalam membuat desain pembelajaran yang inovatif, kurangnya kerjasama antar guru PPKn itu sendiri serta tingkat motivasi yang rendah.

Sedangkan dilihat dari segi siswa yang belajar, berbagai kendala yang muncul, antara lain: kurang memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah, suasana pembelajaran kurang hidup atau kaku, bahan pembelajaran yang kurang

menantang, waktu yang dialokasikan relatif singkat, semangat atau motivasi belajarnya rendah, serta kesungguhan siswa dalam proses belajarnya rendah.

Faktor-faktor yang sekarang ini menjadi tantangan bagi guru-guru Civics/PPKn diantaranya:

- a. Tujuan pelajaran dan pengajaran civic dan *civic education* yang belum jelas,
- b. Bahan atau isi pelajaran, silabus dikaitkan dengan situasi politik, buku pelajaran yang sering berganti-ganti.
- c. Metode mengajar dan evaluasi,
- d. Tujuan pelajaran dan batasan Civic yang kabur sering membuat kekeliruan. Sesuai pula dengan sifat dari isi ilmu-ilmu sosial, umumnya terdiri atas berbagai macam konsep yang abstrak, seperti:
 - 1) *Substantive concepts* (kekuasaan, kedaulatan),
 - 2) *Value concepts* (*empathy, government by concern of the government*),
 - 3) *Concepts of methods, technique and aspect of method*, misalnya observasi, klasifikasi, pengukuran, analisis dan sintesis. (Syracure University Curriculum Centre, 1970 dalam Somantri 2001).

Konsep-konsep tersebut adalah abstrak dan memerlukan keterampilan guru untuk dapat mengorganisasikan bahan sedemikian rupa, sehingga bahan pelajaran menjadi menarik, menantang dan menyenangkan. Jenis-jenis generalisasi dan konsep yang abstrak itu menantang guru-guru untuk dapat menyampaikan konsep-konsep tersebut kepada para siswa agar mereka dapat memahami bahan pelajaran dengan baik, sehingga dapat mengantarkan mereka untuk mencapai tujuan Civics/PPKn.

Pada saat ini terdapat kecenderungan bahwa guru menggunakan teknik mengajar tradisional seperti *ground-covering technique, drill master, indoctrinasi*, dan *narrative technique* (Somantri, 1999: 10).

Beberapa titik kritis yang dialami oleh guru-guru dalam mengajar Civics/PPKn sebagai berikut:

- 1) Terdapat hal-hal yang *controversial* antara isi buku pelajaran Civics/PPKn dengan kehidupan sehari-hari.
- 2) Menurut pedoman kurikulum, pendekatan pemecahan masalah (*problem solving*) disarankan untuk dipergunakan, tetapi isi bahan buku pelajaran sulit untuk dijadikan bahan yang problematik
- 3) Salah satu tujuan Civics / PPKn adalah untuk menumbuhkan warga negara yang demokratis. Dengan demikian proses berpikir reflektif, kritis, analitis dan kreatif, seyogyanya dikembangkan tetapi dalam kenyataannya, *ground covering technique* dan indroktinasi lebih menguasai teknik mengajar sehari-hari.
- 4) Untuk menumbuhkan warga negara yang demokratis "*authority of method*" harus dominan, tetapi kenyataan "*method of authority*" itulah lebih dominan. Dengan demikian kelas civics/PPKn yang semestinya sebagai laboratorium demokrasi sulit untuk dicapai.
- 5) Pilihan dan sikap apa yang harus diambil oleh guru Civics/PPKn
Apakah sikap ekstrim propagandis, netral, atau *dedicated and wellinformed teacher*?
- 6) Mengevaluasi hasil belajar civics/PPKn adalah sulit terutama dalam mengevaluasi perubahan sikap, karena itu evaluasi hanya mengungkapkan hafalan saja.

Titik-titik kritis di atas dapat diatasi oleh guru profesional dengan mempertimbangkan saran-saran praktis berikut ini, untuk meningkatkan mutu pengajarannya:

- 1) Sikap bersahabat, tidak agresif, kooperatif, demokratis, sopan dalam memperlakukan siswa, tetapi tetap dapat memelihara wibawa.
- 2) Menghargai pendapat dan menjaga perhatian siswa dengan jalan menunjukkan adanya relevansi antara pendapat tersebut dengan tujuan pelajaran Civics/PPKn.
- 3) Antusias terhadap bahan pelajaran yang sedang dibicarakan.
- 4) Dapat memperkaya bahan pelajaran yang terdapat dalam buku pelajaran dengan sumber-sumber majalah, surat kabar, cerita cerita film, maupun hubungannya dengan bahan pelajaran.
- 5) Dapat merumuskan teknik bertanya yang dapat menumbuhkan kemampuan mengingat, berpikir, menilai dan berpikir kreatif pada para siswa.
- 6) Dapat memberi jalan kepada para siswa untuk mendorong kegiatan menyelidiki bahan pelajaran, hingga mereka dapat memiliki keterampilan berpikir ilmiah maupun dapat menemukan sistem nilai yang positif bagi seorang warga negara.

Permasalahannya adalah apakah pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn/Civics), selama ini telah dapat merangsang siswa untuk menumbuhkan kecerdasan sebagai warga negara Indonesia?

Apakah peranan guru PPKn pada dewasa ini telah dipersiapkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam pembelajaran PPKn yang dapat mencerdaskan siswa sebagai warga negara Indonesia (WNI)?

Berkaitan dengan pertanyaan tersebut penulis tergerak untuk mengadakan penelitian yang dapat mengungkap berbagai fenomena yang terjadi dalam pembelajaran PPKn, khususnya mengamati apakah ada usaha-usaha guru PPKn di SMAN 9 Bandung yang berperan untuk menumbuhkan kecerdasan siswa sebagai WNI.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut: "*Bagaimanakah peranan guru dalam pembelajaran PPKn untuk menumbuhkan kecerdasan siswa sebagai Warga Negara Indonesia di SMAN 9 Bandung*"?

Untuk memudahkan analisis hasil penelitian, maka masalah pokok tersebut dijabarkan dalam beberapa sub masalah dan dapat dijadikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dukungan situasi dan kondisi lingkungan pendidikan terhadap berlangsungnya kegiatan pembelajaran PPKn di SMAN 9 Bandung ?
2. Bagaimanakah profil (ciri-ciri khusus) guru PPKn di SMAN 9 Bandung ?
3. Bahan pembelajaran, pendekatan, metoda dan media manakah yang dikembangkan guru PPKn dalam pembelajaran di SMAN 9 Bandung ?
4. Proses pembelajaran dan teknik penilaian yang bagaimana dalam PPKn yang dapat menumbuhkan kecerdasan siswa sebagai WNI ?

5. Kendala-kendala apakah yang dihadapi guru PPKn di SMAN 9 Bandung dalam mencerdaskan siswa sebagai warga negara Indonesia dan usaha-usaha apa yang dilakukannya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Secara Umum

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peranan guru dalam pembelajaran PPKn di SMAN 9 Bandung untuk menumbuhkan kecerdasan siswa sebagai WNI, melalui berbagai pendekatan yang dikembangkan, sesuai dengan ciri khas PPKn itu sendiri.

2. Secara Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan:

1. Dukungan situasi dan kondisi lingkungan (fisik-non fisik) pendidikan terhadap berlangsungnya kegiatan pembelajaran PPKn di SMAN 9 Bandung.
2. Profil (ciri-ciri khusus) guru PPKn di SMAN 9 Bandung.
3. Bahan pembelajaran, pendekatan, metoda dan media yang di kembangkan guru PPKn dalam pembelajaran di SMAN 9 Bandung.
4. Proses pembelajaran dan teknik penilaian dalam PPKn yang dapat menumbuhkan kecerdasan siswa sebagai WNI.

5. Kendala-kendala yang dihadapi guru dalam menumbuhkan kecerdasan siswa sebagai WNI dan usaha-usaha yang dilakukannya dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap dunia pendidikan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam fungsi pembelajaran PPKn.
- b. Membantu untuk memahami secara lebih jauh terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan esensi dan program pembelajaran PPKn.
- c. Sebagai bahan inspirasi bagi peneliti selanjutnya, serta untuk ditemukannya teori-teori baru, tema-tema baru yang berkaitan dengan bidang studi PPKn.

Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- a. Pedoman pembelajaran bagi guru PPKn di SMA dan Sebagai referensi bagi praktisi pendidikan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- b. Gambaran bagi peneliti, untuk mengetahui kemampuan guru PPKn dalam menumbuhkan kecerdasan siswa sebagai WNI. Dengan demikian dapat digunakan sebagai langkah awal untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

- c. Bahan masukan agar dapat lebih meningkatkan daya kinerja dalam menumbuhkan kecerdasan siswa sebagai WNI.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang istilah atau kata-kata yang digunakan dalam tesis ini:

1. Peranan

Peranan (*Role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisahkan oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan (Soekanto Soerjono 1982: 220).

2. Guru (dalam arti sempit adalah pengajar)

Guru adalah jabatan fungsional, profesional sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing siswa untuk mencapai tujuan pendidikannya. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. (Wringhtman, 1977 dalam Usman Uzer M, 2002:4).

3. Peranan Guru

Jadi peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan, perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. (Wringhtman, 1977 dalam Usman Uzer M, 2002:4).

Peranan guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan guru sebagai pengajar dalam pembelajaran PPKn.

Dalam proses pengajaran di sekolah (di kelas) peranan guru lebih spesifik sifatnya dalam pengertian yang sempit yakni dalam hubungan proses belajar mengajar. Peranan guru adalah sekaligus sebagai pengorganisasian lingkungan belajar dan sebagai fasilitator belajar. Thomas E. Curtis dan Wilma W. Bidwell (1977) dalam Oemar Hamalik (2003: 45) menyatakan peranan guru pertama meliputi peranan-peranan yang lebih spesifik, yakni : a) guru sebagai model, b) guru sebagai perencana, c) guru sebagai peramal, d) guru sebagai pemimpin, dan e) guru sebagai penunjuk jalan atau sebagai pembimbing ke arah pusat-pusat belajar.

Guru sekolah menengah adalah guru mata pelajaran yang mempunyai kualifikasi kompetensi mengajar mata pelajaran yang disertifikasi secara periodik (Mulyasa, 2002:160).

4. Pembelajaran

Hakekat pembelajaran merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami dan disepakati oleh pihak yang terkait dalam proses pembelajaran. Guru menempati posisi kunci dan strategis dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan untuk mengarahkan agar siswa dapat mencapai tujuan secara optimal. Untuk itu guru harus mampu menempatkan dirinya secara dinamis dan fleksibel, seperti sebagai: disseminator, informator, transmitter, transformator, organizer, dan evaluator bagi terciptanya kegiatan belajar siswa yang dinamis dan inovatif. (Usman Uzer M, 1995:4)

5. PPKn

PPKn adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada

budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Perwujudan perilaku yang dimaksud di atas adalah perilaku yang memancarkan Iman dan Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat serta perilaku yang mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di samping itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dimaksudkan membekali peserta didik dengan budi pekerti, pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

6. Menumbuhkan kecerdasan siswa sebagai warga negara Indonesia.

Kecerdasan yang dimaksud adalah yang meliputi satu kesatuan dari ketiga potensi diri siswa yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang harus dibina

secara holistik (utuh menyeluruh dan seimbang). Ini berarti bahwa PPKn hanya akan berjalan dengan baik dan manusiawi apabila ketiga potensi diri manusia tersebut dilibatkan dan dibina secara seimbang. Sedangkan kecerdasan dalam Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari: (1) jasmani, (2) rohani, (3) *civic knowledgeability*, (4) *civic awareness*, (5) *civic knowledge*, (6) *civic skills*, and (7) *civic disposition*.

Menumbuhkan kecerdasan adalah upaya yang berupa tindakan, ucapan, pikiran, sikap dorongan perilaku yang dilakukan guru atau pendidik dan kepala sekolah, baik kegiatan yang bersifat ekstra, intra maupun kokurikuler kepada siswa, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang kurang cerdas menjadi lebih cerdas, dari yang salah menjadi benar dari yang tak bermoral menjadi bermoral dan sebagainya.

Siswa adalah peserta didik yang terdaftar di sekolah yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai siswa.

Warga Negara Indonesia adalah penduduk negara atau bangsa Indonesia yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan yang disahkan oleh UU. mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara di Indonesia.